

## OPTIMALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA CISAAT KABUPATEN SUBANG, JAWA BARAT

Tri Hesti Utamingtyas ; Mardiyah Aliviani Batubara ; Ifrohatun  
Umiversitas Negeri Jakarta  
*trihesti@unj.ac.id*

### **Abstract**

*The Village Fund is one source of income in every village, which comes from the government. With the Village Fund, the amount of Village income will increase. Increasing village income is intended to improve community service facilities in the form of meeting basic needs, strengthening village institutions and other activities needed by village communities which are decided through the Village Musrenbang. However, the existence of the Village Fund also raises a new problem, namely that not a few people are worried about the management of the Village Fund. This is related to the condition of village officials who are considered to have low quality human resources, and the community is not yet critical of the management of the village income and expenditure budget (APBDesa) so that the form of supervision carried out by the community cannot be maximized. Although the preparation of the APBDes in Cisaat Village has involved elements of the community, the impact has not been felt to the maximum so that improvements and improvements are still needed so that the benefits are increasingly felt by the entire village community*

**Keywords:** APBDes, Village Fund

### **Abstrak**

*Dana Desa merupakan salah satu sumber pemasukan di setiap desa, yang berasal dari pemerintah. Dengan adanya Dana Desa, jumlah pendapatan Desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa dimaksudkan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun Penyusunan APBDes Desa Cisaat sudah melibatkan unsur masyarakat, akan tetapi dampaknya belum dirasakan secara maksimal sehingga masih diperlukan perbaikan dan peningkatan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Desa*

**Kata Kunci:** APBDes, Dana Desa

### **1. PENDAHULUAN (Introduction)**

Dana Desa diterima oleh pemerintah desa merupakan anggaran dana yang diberikan pemerintah kepada desa dan bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan besarnya paling sedikit 10% dari APBN. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana desa harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas. Semua bentuk laporan penggunaan dana desa harus dibuat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, telah diatur beberapa prioritas pemanfaatan dana desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Salah satu prioritas yang dimaksud adalah untuk membantu masalah ekonomi di desa. Selain digunakan untuk pembangunan desa, dana tersebut juga dimaksudkan untuk membangun sumber daya manusia di desa berupa pembinaan dan pendampingan yang lebih tertata. Dengan adanya dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa,

menurunkan tingkat pengangguran, serta menghambat laju urbanisasi, juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa setempat serta mendorong kreativitas warga desa untuk menciptakan peluang-peluang pendapatan bagi desa.

Mengutip pendapat Yuwono (2022) bahwa secara keseluruhan, Dana Desa telah disalurkan sebesar 400,1 triliun rupiah sejak tahun 2015 dan telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa, seperti jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, fasilitas air bersih, drainase, sumur, serta sejumlah infrastruktur lainnya. Capaian *outcome* dari penyaluran Dana Desa selama tahun 2015 sampai dengan 2020 bisa dilihat dari indikator jumlah penduduk miskin di desa. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di desa pada Maret 2015 sebanyak 17,89 juta jiwa dan terjadi penurunan menjadi 15,26 juta jiwa pada Maret 2020. Dari data ini bisa dilihat bahwa pemanfaatan Dana Desa berpengaruh positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di desa, sebelum pandemi Covid-19 melanda di Indonesia.

Dana Desa tahun 2022 diharapkan berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi pada level desa, namun terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diatasi agar Dana Desa bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. **Pertama**, kualitas sumber daya manusia pengelola Dana Desa yang tidak merata antar desa. Pengajuan Dana Desa mempersyaratkan dokumen yang harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa.

Dokumen tersebut sebagian besar merupakan output dari aplikasi untuk mempermudah pengisian data dan pelaporan Dana Desa. Sehingga, aparat desa harus paham teknologi dan memiliki infrastruktur pendukung Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perubahan peraturan harus segera disikapi dan ditindaklanjuti dengan cepat agar tidak menghambat proses penyaluran Dana Desa. **Kedua**, terdapat potensi desa yang bermasalah secara hukum atau malah Kepala Desa menyalahgunakan Dana Desa yang menjadi tanggung jawabnya.

Raharjo (2018) meneliti tentang Optimalisasi Penyusunan dan Penggunaan APBDes di Kabupaten Magelang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan APBDes di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal karena ada beberapa kendala, diantaranya terkait dengan kendala dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain keterbatasan anggaran, proses perencanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa pada saat musyawarah desa, rendahnya swadaya masyarakat, keterlambatan pencairan dana desa, belum ada pengaturan tentang patokan anggaran dalam menyusun APBDes dan ketika keterlambatan pencairan dana, perubahan nominal dana APBDes yang diterima.

Rosmini (2021) berpendapat bahwa dengan melakukan analisa efektivitas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa sehingga pembangunan dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa, sehingga harus dilakukan seoptimal

mungkin dan didukung oleh kompetensi sumber daya masyarakat yang mengelolanya. Salah satu upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes adalah dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Penerapan TIK dapat dilakukan saat proses penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pengawasan baik oleh pimpinan pemerintahan desa dan masyarakat serta unsur-unsur terkait lainnya.

## 2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

### Pengertian Anggaran

Mardiasmo (2009:61) menyebutkan bahwa “anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”, sedangkan penganggaran (*budgeting*) merupakan aktifitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas (Haryanto dkk: 2007). Sembiring (2009) mendefinisikan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja pemerintah yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Rupiah).

Penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang sangat kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil masyarakat (DPR/DPRD/BPD). Anggaran pemerintah merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan progam-program yang dibiayai dengan uang publik. Proses penganggaran dimulai ketika perencanaan strategik dan perumusan strategi telah diselesaikan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat mengagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan (Mardiasmo, 2009:62).

### 2.1 *Traditional Budgeting System*

*Traditional budgeting system* adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sembiring, 2009). *Traditional budget* selama ini juga didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line-item* dan *incrementalism*, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya (Bastian, 2009:86).

Sistem *traditional budgeting* lebih banyak menekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokan pos-

pos anggaran didasarkan atas obyek-obyek pengeluaran, sedangkan distribusi anggaran didasarkan atas jatah tiap

tiap SKPD (Bastian, 2009:86). Dasar pemikirannya adalah setiap pengeluaran negara harus didasarkan pada perhitungan dan penelitian yang ketat agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan atas dana yang terbatas, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar terhadap anggaran baru (Mardiasmo, 2009:78). Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat.

## **2.2 Performance Based Budgeting**

Penganggaran (*budgeting*) merupakan aktifitas mengalokasikan sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas (Haryanto, dkk: 2007). Dengan demikian, *Performance Based Budgeting* (Penganggaran Berbasis Kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada “*output*” organisasi dan berkaitan sangat erat dengan Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi, sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan (Haryanto, dkk, 2007:74).

Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2005 menyatakan bahwa kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu :

- 1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
- 2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
- 3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).
- 4) Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) yang jelas.
- 5) Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Penyempurnaan sistem administrasi merupakan penyiapan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja secara terus menerus. Sumber daya manusia yang cukup yaitu tersedianya upaya peningkatan implementasi anggaran berbasis kinerja berupa adanya

upaya penyediaan pendidikan dan keterampilan yang menunjang peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas implementasi anggaran berbasis kinerja (Sembiring.2009).

## **2.3 Planning, Programming, Budgeting System (PPBS)**

*Planning, Programming, Budgeting System* (PPBS) merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumberdaya berdasarkan analisis ekonomi (Mardiasmo, 2009:87). Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada

struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokkan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu program penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintahan di dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik (Bastian.2009:89). Hal tersebut disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki pemerintah yang terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat sangat banyak bahkan tidak terbatas jumlahnya, dalam keadaan seperti itu, pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS memberikan kerangka untuk membuat pilihan tersebut (Mardiasmo.2009:87). Bastian (2009:88) Menjelaskan komponen PPBS antara lain:

- 1) *Planning*, pada pokoknya memikirkan dan memastikan segala apa yang menjadi kebutuhan riil, menentukan data-data, tujuan serta memilih jalannya guna mencapai data-data tersebut dari sekian banyak alternatif.
- 2) *Programming*, adalah mengatur, mengorganisir, dan membimbing rangkaian jalan jalan tertentu yang menuju tercapainya tujuan dan data-data sebagaimana yang ditetapkan dalam *planning*.
- 3) *Budgeting*, yaitu menterjemahkan keputusan-keputusan *planning* dan *programming* tersebut diatas menjadi rencana-rencana keuangan khusus selama suatu periode.
- 4) *System*, adalah mekanisme yang melakukan integrasi, checking, dan peninjauan kembali serta koreksi terhadap semua desisi *planning*, *programming*, *budgeting*, sehingga segala sesuatunya berlangsung didalam rangka administrasi yang stabil dan konsekuen.

PPBS (*planning, programming, budgeting system*) bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program dan penganggaran dipandang sebagai suatu system yang tak terpisahkan satu sama lainnya. PPBS merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif (Bastian, 2009:88).

Penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan tentang prinsip-prinsip penganggaran. Halim dan Iqbal (2012) menjelaskan prinsip-prinsip penganggaran antara lain:

- 1) Transparansi dan akuntabilitas anggaran. Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.
- 2) Disiplin anggaran. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan/proyek yang diusulkan
- 3) Keadilan anggaran. Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat

tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan pemerintah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

- 4) Efisiensi dan efektifitas anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.
- 5) Disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

### Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut (Sembiring, 2009). Penerapan penganggaran berbasis kinerja akan mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan, sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (*outputs*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektifitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan (Ismail dan Idris.2009:120).

Sembiring (2009) menjelaskan maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah: 1) mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*ouput*) dan dampak (*outcome*) atas alokasi belanja (*input*) yang ditetapkan; 2)Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran; 3)Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara/lembaga.

Ismail dan Idris (2009:102) menjelaskan penerapan penganggaran berbasis kinerja tersebut akan tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA). Secara substansi RKA menyatakan informasi kebijakan beserta dampak alokasi anggarannya. Informasi yang dinyatakan dalam RKA antara lain berupa:

- 1) Kebijakan dan hasil yang diharapkan dari suatu program.
- 2) Kondisi yang diinginkan untuk mencapai sasaran program berupa *output* dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kegiatan dan keluarannya beserta masukan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan.

Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah: a) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya; b) Pengumpulan informasi yang sistematis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya, selanjutnya implementasi tentang Anggaran Berbasis Kinerja, pada

kenyataannya adalah menyangkut dokumen anggaran, baik perencanaan maupun pelaksanaan, seperti RKA (Rencana Kerja Anggaran), Pagu Anggaran Sementara, dan DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran).

Keluaran (*output*) merupakan prestasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Keluaran (*output*) kegiatan satuan kerja adalah sesuai dengan yang direncanakan dan dimuat dalam dokumen Rencana kinerja tahunan Renja) dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Ismail dan idris, 2009:102).

### **Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan (Sembiring.2009). Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Ismail dan Idris (2009:122) menjelaskan bahwa tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok: masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja disetiap indikator dalam suatu kegiatan.

### **Target Kinerja**

Setelah indikator kinerja ditentukan, mulailah disusun target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang telah ditentukan, penetapan target kinerja dimaksudkan untuk mengetahui target (sasaran kuantitatif) dari pelaksanaan kegiatan/program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan (Edstrom, 2009:7). Target kinerja harus mempertimbangkan sumber daya yang ada dan juga kendala-kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menentukan target kinerja yang baik, seperti dapat dicapai, ekonomis, dapat diterapkan,

konsisten, menyeluruh, dapat dimengerti, dapat diukur, stabil, dapat diadaptasi, legitimasi, seimbang, dan fokus kepada pelanggan.

Penetapan target kinerja dalam Sembiring (2009) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Spesifik, berarti unik yang menggambarkan obyek/subyek tertentu, tidak diinterpretasikan lain; b) Dapat diukur, secara obyektif dapat diukur baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; c) Dapat dicapai (*attainable*). Sesuai dengan

usaha-usaha yang dilakukan pada kondisi yang diharapkan akan dihadapi: a) Realistis; b) Kerangka waktu pencapaian (*time frame*) jelas; dan c) Menggambarkan hasil atau kondisi perubahan yang ingin dicapai.

### 3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Agar kegiatan ini menjadi efektif dan memiliki makna serta manfaat bagi masyarakat Desa Cisaat Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, maka kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan metode diskusi, musyawarah, dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan direncanakan akan dilakukan selama 3 tahap, yaitu: **Tahun I** kegiatan pendampingan:

- 1) Mengikuti kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh pimpinan pemerintahan desa, serta tokoh-tokoh masyarakat, sebagai bentuk analisa situasi kebutuhan utama masyarakat Desa Cisaat.
- 2) Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan serta menyusun prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengelola pemerintah Desa
- 3) Melakukan analisa SWOT atas program kerja yang diusulkan oleh pengelola pemerintahan Desa
- 4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa tentang rencana pengembangan dan potensi pengelolaan Desa di wilayahnya.
- 5) Setelah program kerja dilakukan Analisa maka dapat diketahui apakah program yang diusulkan dapat berjalan dan memiliki potensi yang baik dan menjanjikan dimasa datang. Untuk kelanjutan program tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh pengelola Pemerintah Desa dengan masyarakat setempat, maka pendampingan akan terus dilanjutkan hingga program pemerintah Desa berjalan baik dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

**Tahun II** kegiatan pendampingan:

Berdasarkan analisa situasi dan kebutuhan yang didapat pada tahun pertama, maka pengelola penyusunan laporan keuangan desa mulai dikembangkan dengan melibatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

**Tahun III** kegiatan pendampingan:

Setelah kegiatan penyusunan APBDes mulai berjalan optimal dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diperoleh dalam Tahun II, maka perlu dilakukan pendampingan dalam hal tata kelola penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas pertanggungjawaban dana yang dikelola oleh pemerintah Desa untuk dilaporkan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)**

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pada tahun pertama di Desa Cisaat Kabupaten Subang Jawa Barat berjalan dengan lancar. Proses penyusunan APBDes Desa Cisaat sudah melibatkan perwakilan unsur masyarakat Desa dalam Musrembang. Saat melakukan sosialisasi dan pendampingan, masyarakat Desa Cisaat berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyusunan APBDes. Kepala Desa Cisaat senantiasa melibatkan partisipasi warganya dalam setiap kegiatan pemerintahan di Desanya.

Meskipun proses penyusunan APBDes di Desa Cisaat sudah berjalan baik, tetapi dalam hal pengawasan masih ditemukan kelemahan, dimana informasi terkait laporan keuangan dan laporan Kegiatan hanya terbatas untuk lingkungan Desa saja. Keterbukaan informasi pertanggungjawaban dana yang dihimpun dari masyarakat sebaiknya juga dapat dipublikasikan secara luas. Publikasi laporan rencana kegiatan dan laporan pertanggungjawaban dapat terpublikasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Keterbukaan informasi melalui pemanfaat TIK akan berdampak terhadap akuntabilitas pertanggungjawaban pemerintah Desa dan pelaksanaan pengawasan oleh pihak-pihak terkait. Pemanfaatan TIK saat ini menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan efisiensi dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun.

#### **5. KESIMPULAN DAN SARAN (*Conclusions*)**

Pemahaman masyarakat Desa Cisaat Kabupaten Subang atas proses penyusunan dan laksanaan APBDes sangat baik dan partisipatif. Masyarakat mersa dilibatkan dalam proses pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Desa. Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung, dapat mengurangi praktik penyimpangan dalam penyerapan dana bantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat (Dana Desa) dan Pemerintah Daerah (Alokasi Dana Desa) serta pemanfaatan kekayaan yang dimiliki oleh Des aitu sendiri. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaannya serta pengawasan yang akan dilakukan, akan menjadi efektif dan efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta adanya peningkatan keterampilan serta kompetensi aparatur pemerintah Desa setempat.

#### **7. DAFTAR PUSTAKA (*References*)**

- Achyani, Fatchan dan Cahya 2011. Analisis Aspek Rasional Dalam Penganggaran Publik Terhadap Efektivitas Pengimplementasian Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Program Studi Akuntansi*, 2: 70.
- Asmadewa, Indra. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kefektifan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja: Studi pada Pemerintah Pusat*. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Program Magister Sains Universitas Gadjah Mada.

- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: Deputi BPKP.
- Halim, Abdul dan Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Haryanto, Arifuddin, dan Sahnuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail dan Idris. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dan BLU*. Jakarta: Indeks
- Izzaty, Khairina Nur. 2011. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Peneapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Local Governance Support Program Finance & Budgeting Team. 2009. *Contoh-contoh Indikator Kinerja SKPD*. Jakarta: USAID
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Raharjo, Eko, 2018, Optimalisasi Penyusunan Dan Penggunaan Apbdes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Magelang, <http://eprintslib.ummg.ac.id>
- Rosmini, 2021, Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, <https://repository.ummat.ac.id/>
- Said, Darwis, et al. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi 1*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2009. *Research Methods for Business 5th Edition*. United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Sembiring, Benar Baik. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Pemerintah Kabupaten Karo)*. Tesis tidak diterbitkan. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. 2004. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 2003. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. 2004. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. 2004. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Vian, Taryn. 2010. *Good Governance and Performance-Based Budgeting: Factors Affecting Reform Progress in Lesotho Hospitals*. Disertasi tidak diterbitkan. Boston: University Professor Program Boston University.
- Yuwono, Tatag Prihantara, 2022, Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022, <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.htm>